

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Analisis Aset Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

A. Pemerintah Kota Surabaya

Secara umum Kota Surabaya memiliki kinerja Keuangan yang baik, hal ini dapat ditinjau dari hasil Analisis Rasio Keuangan (Rasio Likuiditas, Modal Kerja terhadap Total Aset dan Rasio Solvabilitas) menunjukkan nilai dan *Prosentase* yang tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa, terjadi penurunan jumlah kas daerah pada Tahun Anggaran 2019 hingga Tahun Anggaran 2020, hal ini perlu menjadi perhatian kerana dengan berkurangnya kas dapat mengganggu kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

B. Pemerintah Kota Malang

Secara umum Kota Malang memiliki kinerja Keuangan yang baik, hal ini dapat ditinjau dari hasil Analisis Rasio Keuangan (Rasio Likuiditas, Modal Kerja terhadap Total Aset dan Rasio Solvabilitas) menunjukkan nilai dan *Prosentase* yang tinggi. Namun ada rasio yang menunjukkan penurunan yakni rasio kas yang dipengaruhi oleh berkurangnya aset lancar yang dimulai tahun 2019- 2020 yang akan berdampak pada kinerja keuangan Pemerintah daerah kota malang. Sedangkan untuk rasio modal kerja dan juga rasio solvabilitas kota malang pada tahun 2018 -

2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya, berbeda dengan tahun 2019 – 2020 dimana rasio modal kerja dan rasio solvabilitas yang mengalami penurunan, hal ini terbukti dengan kemampuan pemerintah kota Malang dalam memenuhi utang-utangnya yang disebabkan oleh beberapa indikator yakni aktiva lancar yang tinggi pada pos kas daerah, penurunan utang lancar serta penurunan utang belanja yang signifikan yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 – 2020.

C. Pemerintah Kabupaten Malang

Secara umum kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang ditinjau dari Analisis Rasio Keuangan memiliki kinerja yang baik. dibuktikan dengan Rasio Likuiditas, Modal Kerja terhadap Total Aset dan Rasio Solvabilitas) menunjukkan Nilai dan *Prosentase* yang tinggi. Meskipun dalam masih kategori bagi namun perlu di perhatikan pada pos hutang harus menjadi perhatian khusus agar tidak membebani kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan ditunjang dengan peningkatan total aktiva Pemerintah Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2016-2020.

D. Pemerintah Kota Batu

Secara umum kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu ditinjau dari Analisis Rasio Keuangan memiliki kinerja yang baik. dibuktikan dengan Rasio Likuiditas, Modal Kerja terhadap Total Aset dan Rasio Solvabilitas) menunjukkan Nilai dan *Prosentase* yang tinggi.

2. Berdasarkan Analisis Kewajiban dan Ekuitas kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

A. Pemerintah Kota Surabaya

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya ditinjau dari Analisis Kewajiban dan Ekuitas memiliki kinerja yang baik, dimana kewajiban Pemerintah Kota Surabaya memiliki rata-rata kewajiban sebesar 1,37% terhadap Ekuitas. Namun Ini hasil dari rasio utang terhadap PAD yang menunjukkan *Prosentase* yang tinggi yaitu 12% ini dapat menjadi peringatan untuk Pemerintah Daerah agar mengevaluasi Jumlah Hutang nya.

B. Pemerintah Kota Malang

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang ditinjau dari Analisis Kewajiban dan Ekuitas memiliki kinerja yang baik, meskipun kewajiban Pemerintah Kota Malang mengalami kenaikan namun jika ditinjau dengan hasil rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap PAD nilainya masih sangat rendah. Kenaikan kewajiban disebabkan oleh utang belanja modal DAK yang digunakan untuk pembangunan jalan dan konstruksi dan belum diakuinya pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah.

C. Pemerintah Kabupaten Malang

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang ditinjau dari Analisis Kewajiban dan Ekuitas memiliki kinerja Baik, dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio yang rendah. Meski hasil analisis masuk dalam kategori baik namun Kewajiban Pemerintah Daerah mengalami kenaikan yang cukup besar, hal ini disebabkan oleh besarnya utang beban pada BLUD Puskesmas pada Tahun 2020 untuk penanggulangan wabah COVID-19.

D. Pemerintah Kota Batu

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang ditinjau dari Analisis Kewajiban dan Ekuitas memiliki kinerja Baik, dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio yang rendah. Pada Tahun Anggaran 2017 terjadi kenaikan Kewajiban dikarenakan adanya pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya untuk semua pegawai badan keuangan daerah. Dan untuk kewajiban jangka pendek juga mengalami kenaikan disebabkan oleh sedang berlangsungnya pembangunan pasar Kota Batu tahap 1.

3. Berdasarkan Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

A. Pemerintah Kota Surabaya

Secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan baik berdasarkan nilai Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, Efektivitas Pajak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan Pemerintahannya tidak tergantung kepada Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat karena *Prosentase* Rasio kemandirian yang tinggi dan juga *Prosentase* Rasio Ketergantungan yang rendah.

B. Pemerintah Kota Malang

Secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang dapat dikatakan kurang baik ini berdasarkan nilai Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Derajat Desentralisasi. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Malang memiliki nilai rasio kemandirian yang rendah dan Rasio ketergantungan yang Tinggi. Ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Malang dalam menjalankan pemerintahannya sangat tergantung kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Namun untuk rasio efektivitas PAD dan efektivitas Pemerintah Kota Malang memiliki nilai Rasio yang tinggi, ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Malang efektif dalam mengelola PAD dan pajak daerah.

C. Pemerintah Kabupaten Malang

Secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dapat dikatakan kurang baik ini berdasarkan nilai Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan dan Kontribusi BUMD dan Derajat Desentralisasi. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan pemerintahannya sangat tergantung kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan juga kontribusi dari BUMD yang sangat kecil. Namun Pemerintah Kabupaten Malang jika ditinjau dari Rasio Efektivitas PAD dan Pajak memiliki kinerja yang baik karena bisa mengelola PAD dan Pajaknya dengan efektif dan biaya yang kecil.

D. Pemerintah Kota Batu

Secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu dapat dikatakan kurang baik ini berdasarkan nilai Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan dan Kontribusi BUMD dan Derajat Desentralisasi. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Batu dalam menyelenggarakan pemerintahannya sangat tergantung kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan juga kontribusi dari BUMD yang sangat kecil. Namun kinerja Pemerintah Kota Batu jika ditinjau dari Rasio Efektivitas PAD dan Pajak memiliki kinerja yang baik karena bisa mengelola PAD dan Pajaknya dengan efektif dan biaya yang kecil.

4. Berdasarkan Analisis Arus Kas secara umum Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

A. Pemerintah Kota Surabaya

Secara keseluruhan dilihat dari Analisis Laporan Arus Kas Kota Surabaya memiliki Kinerja Keuangan yang baik, ditunjukkan dengan Arus Kas dari aktivitas operasi yang bersaldo positif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan keuangan, Arus kas dari aktivitas Investasi yang bersaldo negatif, ini menandakan pemerintah daerah aktif melakukan pembangunan fisik aset tetap yang ditandai dengan pengeluaran kas untuk belanja modal lebih besar dibandingkan penerimaan kas dari penjuwalann aset tetap., Arus kas transitoris memiliki rata-rata yang positif mengindikasikan kondisi kesehatan keunagan daerah yang cukup baik karena terjadi surplus dana.

B. Pemerintah Kota Malang

Secara keseluruhan dilihat dari Analisis Laporan Arus Kas Kota Malang memiliki Kinerja Keuangan yang baik, ditunjukkan dengan Arus Kas dari aktivitas operasi yang bersaldo positif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan keuangan, Arus kas dari aktivitas Investasi yang bersaldo negatif, ini menandakan pemerintah daerah aktif melakukan investasi dalam bentuk pembangunan. Arus kas transitoris memiliki rata-rata yang positif mengindikasikan kondisi kesehatan keunagan daerah yang cukup baik karena terjadi surplus dana.

C. Pemerintah Kabupaten Malang

Secara keseluruhan dilihat dari Analisis Laporan Arus Kas Kabupaten Malang memiliki Kinerja Keuangan yang baik, ditunjukkan dengan Arus Kas dari aktivitas operasi yang bersaldo positif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan keuangan, Arus kas dari aktivitas Investasi yang bersaldo negatif, ini menandakan pemerintah daerah aktif melakukan investasi dalam bentuk pembangunan. Arus kas transitoris memiliki rata-rata yang positif mengindikasikan kondisi kesehatan keuangan daerah yang cukup baik karena terjadi surplus dana.

D. Pemerintah Kota Batu

Secara keseluruhan dilihat dari Analisis Laporan Arus Kas kota Batu memiliki Kinerja Keuangan yang baik, ditunjukkan dengan Arus Kas dari aktivitas operasi yang bersaldo positif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan keuangan, Arus kas dari aktivitas Investasi yang bersaldo negatif, ini menandakan pemerintah daerah aktif melakukan investasi dalam bentuk pembangunan. Arus kas transitoris memiliki rata-rata yang positif mengindikasikan kondisi kesehatan keuangan daerah yang cukup baik karena terjadi surplus dana.

5.2 Saran

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa secara umum dari Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki kinerja yang baik, namun tetap saja ada beberapa hal yang memiliki kinerja kurang baik, oleh sebab itu penulis emberikan saran kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Untuk Kebijakan Praktis :

A. Kota Surabaya :

A1. Pemerintah Daerah Kota Surabaya agar dapat menjaga ketersediaan kas daerah agar tetap seimbang dengan cara tidak berlebihan dalam melakukan pembangunan, dan juga terus menjaga prestasi dalam mengelola PAD dan Pajak daerah yang efektif serta efisien dengan biaya serendah-rendahnya serta dapat meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD kota Surabaya.

B. Kota Malang

B1. Pemerintah Daerah Kota Malang agar dapat menjaga prestasi dalam mengelola PAD dan Pajak daerah yang efektif serta efisien dengan biaya serendah-rendahnya serta dapat meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD kota Malang, serta dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat dengan dengan cara terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

C. Kabupaten Malang

C1. Pemerintah Kabupaten Malang sebaiknya terus mengurangi tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang, serta meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Malang. Serta menjaga proporsi hutang terhadap PAD agar tidak terlalu membebani anggaran dengan cara melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan

D. Kota Batu

D1. Pemerintah Kota Batu sebaiknya harus terus mengurangi tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu terutama dari sektor pariwisata. Agar dapat menjalankan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan karakter wilayah sendiri

2. Bagi peneliti Selanjutnya :

Agar peneliti selanjutnya yang tertarik pada konsentrasi akuntansi Pemerintahan dapat lebih mendalam dengan cara memperluas daerah dan tahun penelitian.

3. Perbaikan Metode :

Diharapkan dimasa yang akan datang ada yang meneliti dengan metode kuantitatif, untuk memperkaya hasil penelitian ini.

